

Sekda HSS sampaikan tanggapan terhadap Raperda pengelolaan keuangan daerah



Sumber gambar:

<https://kalsel.antaranews.com/berita/309925/sekda-hss-sampaikan-tanggapan-terhadap-raperda-pengelolaan-keuangan-daerah>

Sekretaris Daerah (Sekda) H Muhammad Noor menyampaikan jawaban eksekutif atas pandangan umum Fraksi-fraksi atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) HSS, tentang pengelolaan keuangan daerah, di ruang rapat gedung DPRD setempat.

Ia mengatakan, berharap dengan adanya tanggapan atau jawaban eksekutif ini dapat memberikan pemahaman lebih jelas kepada DPRD HSS, sehingga ke depannya nanti pembahasan raperda ini bisa berjalan dengan mulus sehingga bisa menghasilkan Peraturan Daerah (Perda).

Dijelaskan dia, menanggapi Fraksi PDIP terkait peningkatan pelayanan terhadap RSUD Daha Sejahtera, yakni dengan adanya alat cuci darah sehingga dapat melayani warga yang memerlukan. Kemudian terkait Sekolah Luar Biasa di HSS yang dapat dijelaskan berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No.9 Tahun 2015.

Pada dasarnya pengelolaan pendidikan khusus merupakan kewenangan pemerintah provinsi, selanjutnya berkenaan dengan pembangunan Jembatan Parigi dapat disampaikan proyek pembangunan jembatan dimaksud pemerintah daerah melalui Dinas

PUTR di Tahun 2021 telah melaksanakan beberapa tahapan pra konstruksi. Kegiatan pendataan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, air minum dan sanitasi yang merupakan pelayanan yang utama akan dilakukan, setelah kondisinya memungkinkan akan dilaksanakan melalui dana bencana.

Kemudian, menanggapi Fraksi PKS, berkenaan dengan mekanisme pengelolaan keuangan daerah dapat disampaikan bahwa pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam APBD dilaksanakan pemerintah daerah dan diawasi oleh DPRD terdapat empat tahapan yang harus dilakukan.

Meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, Berkaitan dengan perencanaan sumber pendapatan maka perlu dilakukan analisis komperhensif untuk memuktahirkan data-data obyek pendapatan, memiliki target kinerja memenuhi indikator indeks pengelolaan keuangan daerah.

Selanjutnya, terkait sumber usaha baru yang akan disahkan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan PAD, dapat dijelaskan bahwa jenis usaha baru yang saat ini belum memungkinkan ada yang bisa dikelola, yang disebabkan oleh keterbatasan kewenangan.

Upaya pemerintah daerah yang ditempuh dalam meningkatkan PAD, antara lain Intensifitansi pajak retribusi, pemutakhiran data wajib pajak sehingga tarif sesuai dengan kondisi terakhir, penggunaan tekhnologi informasi dalam pemantauan transaksi, memberikan kemudahan pembayaran pajak dengan aplikasi online.

Menurut dia, terdapat empat tahapan yang harus dilakukan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah. Untuk mencapai good governance maka pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat serta taat kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan perencanaan sumber pendapatan perlu dilakukan analisis komperhensif untuk memuktahirkan data-data obyek pendapatan, memiliki target kinerja yang memenuhi indeks pengelolaan keuangan daerah, mewujudkan APBD responsif terhadap kebutuhan pemenuhan kesejahteraan masyarakat.

Sumber berita:

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/309925/sekda-hss-sampaikan-tanggapan-terhadap-raperda-pengelolaan-keuangan-daerah>, Sekda HSS sampaikan tanggapan terhadap Raperda pengelolaan keuangan daerah, 2 Februari 2022.

2. <https://suaraborneo.com/2022/02/03/sekda-sampaikan-jawaban-eksekutif-terhadap-ranperda-pengelolaan-keuangan-daerah-dalam-rapat-paripurna-dprd-kab-hss/>, 3 Februari 2022.

Catatan:

🌟 **Pengertian Peraturan Daerah**

Peraturan Daerah atau yang sering disingkat dengan **Perda** merupakan instrumen yang strategis dalam mencapai tujuan desentralisasi. Peranan perda dalam otonomi daerah meliputi:

1. Perda sebagai instrumen kebijakan dalam melaksanakan otonomi daerah yang luas dan bertanggungjawab.
2. Perda merupakan pelaksana peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
3. Penangkap dan penyalur aspirasi masyarakat daerah.
4. Sebagai alat transformasi perubahan daerah.
5. Harmonisator berbagai kepentingan.

Peraturan Daerah yang disebut dengan Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh **Dewan Perwakilan Rakyat Daerah** dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. Jenis peraturan daerah termasuk kedalam **jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan** yang termuat dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan Daerah terdiri atas:

- **Peraturan Daerah Provinsi**, yang berlaku di provinsi tersebut. Peraturan Daerah Provinsi dibentuk oleh DPRD Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.
- **Peraturan Daerah Kabupaten/Kota**, yang berlaku di kabupaten/kota tersebut. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dibentuk oleh DPRD Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tidak subordinat terhadap Peraturan Daerah Provinsi.

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Perda memiliki muatan materi sebagai berikut.

- penyelenggaraan **Otonomi Daerah** dan Tugas Pembantuan;
- penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

- memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

🌟 Tahapan Penyusunan Peraturan Daerah

1. Perencanaan

Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah dilakukan dalam Program Legislasi Daerah. Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis.

Kriteria skala prioritas penyusunan daftar rancangan peraturan daerah dalam Prolegda didasarkan pada:

- a. Perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. Rencana pembangunan daerah;
- c. Penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
- d. Aspirasi masyarakat daerah.

Dalam Prolegda dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas akibat putusan Mahkamah Agung dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi. Serta dalam keadaan tertentu, DPRD atau Gubernur dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi di luar Prolegda Provinsi, yang terdiri atas:

- a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
- b. akibat kerjasama dengan pihak lain; dan
- c. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi dan biro hukum.

2. Penyusunan

Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dapat berasal dari DPRD Provinsi atau Gubernur. Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.

Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. (Pasal 1 angka 11).

Setiap Rancangan Peraturan Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) harus disertai dengan Naskah Akademis. (Pasal 33 ayat (3)).

Pengharmonisasian, pembulatan, dan pementapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang berasal dari Gubernur dikoordinasikan oleh biro hukum dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sedangkan yang berasal dari DPRD Provinsi dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi. Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan Daerah Provinsi berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

3. Pembahasan

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah di DPRD dilakukan oleh DPRD bersama Kepala Daerah. Pembahasan bersama tersebut dilakukan melalui tingkat-tingkat pembicaraan, yang dilakukan dalam rapat: komisi, panitia, alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi, dan paripurna. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembahasan Ranperda diatur dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Rancangan Peraturan Daerah dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah. Sedangkan Rancangan Peraturan Daerah yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah. Ketentuan mengenai tata cara penarikan kembali Rancangan Peraturan Daerah diatur dengan Peraturan DPRD.

4. Pengesahan atau Penetapan

Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Penyampaian Ranperda tersebut dilakukan paling lama 7 hari sejak tanggal persetujuan bersama. Ranperda tersebut ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menjadi Peraturan Daerah dengan membubuhkan tanda tangan dan dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak Ranperda disetujui bersama. Dalam jangka waktu 30 hari Kepala Daerah tidak menandatangani Ranperda yang sudah disetujui bersama, maka Ranperda tersebut sah menjadi Peraturan Daerah dan wajib diundangkan.

5. Pengundangan

Peraturan Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) diundangkan dalam Lembaran Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota). Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Walikota diundangkan dalam Berita Daerah

(Provinsi/Kabupaten/Kota). Pengundangan Peraturan Daerah dalam Lembaran Daerah dan Berita Daerah dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah. Peraturan Perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

6. Penyebarluasan

Penyebarluasan dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah sejak penyusunan Prolegda, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, hingga Pengundangan Peraturan Daerah. Penyebarluasan dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan. Penyebarluasan Prolegda dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota yang dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi. Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD. Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Gubernur atau Bupati/Walikota dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah. Penyebarluasan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota. Naskah Peraturan Perundang-undangan yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, dan Berita Daerah. (sumber: <https://www.dictio.id/t/apa-saja-tahap-tahap-pembentukan-peraturan-daerah/109989/2>)